

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Literasi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan bahwa literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan keyakinan (confidence) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan pribadi lebih baik. OJK menyatakan bahwa visi literasi keuangan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan. Dan misi dari literasi keuangan yaitu melakukan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, dan meningkatkan akses informasi serta penggunaan produk dan jasa keuangan melalui pengembangan infrastruktur pendukung literasi keuangan.

Literasi Keuangan merupakan konsep pemahaman mengenai produk dan konsep keuangan dengan bantuan informasi dan saran, sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami risiko keuangan agar dapat membuat keputusan keuangan dengan tepat (Vidovicova, pada penelitian Wicaksono, 2015). Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan, dengan tujuan mencapai kesejahteraan (Lusardi dan Mitchell, 2007). Hal ini dapat dimaknai bahwa persiapan perlu dilakukan untuk menyongsong globalisasi, dan lebih spesifiknya yaitu globalisasi dalam bidang keuangan. Hilgert, et al, (2003) serta Cude, et al, (2006) juga menyatakan bahwa diperlukan pengetahuan keuangan

serta teknik berinvestasi merupakan hal yang tidak dapat diabaikan lagi seperti waktu-waktu sebelumnya.

Literasi keuangan juga dapat dikatakan sebagai kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memahami, dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan memahami konsekuensi finansial yang ditimbulkannya (Khrisna, 2010).

Pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari tidak akan bisa lepas dari financial literacy seseorang dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat (Orton, 2007). Lusardi dan Mitchell (2007) mengartikan financial literacy sebagai pengetahuan keuangan dan kemampuan dalam mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Bhushan and Medury (2013) menjelaskan literasi keuangan sangat penting karena beberapa alasan. Konsumen yang memiliki literasi keuangan bisa melalui masa-masa keuangan yang sulit karena faktanya bahwa mereka mungkin memiliki akumulasi tabungan, membeli asuransi dan diversifikasi investasi mereka. Literasi keuangan juga secara langsung berkorelasi dengan perilaku keuangan yang positif seperti pembayaran tagihan tepat waktu, angsuran pinjaman, tabungan sebelum habis dan menggunakan kartu kredit secara bijaksana.

Literasi finansial terjadi manakala seorang individu yang cakap atau (literate) adalah seseorang yang memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Kecakapan (literacy) merupakan hal penting yang harus dimiliki untuk mencapai tujuan-tujuannya. Literasi finansial didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memahami, dan mengevaluasi

informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan memahami konskuensi finansial yang di timbulkannya (carolynne L J Mason & Richard M S Wilson : 2000). Krishna, Rofaida, dan Sari (2010) menjelaskan bahwa literasi keuangan membantu individu agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata (rendahnya pendapatan). Kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan (miss management) seperti kesalahan penggunaan kredit, dan tidak adanya perencanaan keuangan. Keterbatasan finansial dapat menyebabkan stress, dan rendahnya kepercayaan diri. Pengertian literasi keuangan, dalam Vitt et al. (2000) adalah kemampuan untuk membaca, menganalisis, mengelola dan berkomunikasi tentang kondisi keuangan pribadi yang akan mempengaruhi kesejahteraan material.

Lusardi dan Mitchell, 2009 (dalam penelitian Lilia Pasca Riani) memotret fenomena ini dalam penelitiannya mengenai kompleksitas pengambilan keputusan ekonomi yang menitik beratkan pada kepemilikan pengetahuan mengenai keuangan akan mendorong keberhasilan usaha dan kesiapan menghadapi masa pensiun. Selanjutnya juga ia membagi variabel kepemilikan pengetahuan keuangan yang selanjutnya disebut *financial literacy* menjadi 2 tahap, yaitu tahap dasar dan tahap lanjutan.

Indikator literasi keuangan tahap dasar meliputi pengetahuan mengenai perhitungan matematika, tingkat suku bunga, inflasi, nilai waktu uang dan tipuan nilai uang. Sedangkan literasi keuangan tahap lanjutan meliputi pengetahuan tentang pasar saham dan fungsinya, reksadana, tingkat suku bunga acuan dan keterkaitannya dengan obligasi, perusahaan pengelola keuangan, pengetahuan

tentang risiko-risiko finansial apabila menginvestasikan uangnya pada berbagai pilihan investasi saham atau obligasi, tingkat pengembalian uang jangka panjang, fluktuasi atau ketidakpastian yang tinggi, dan diversifikasi risiko.

Menurut Oseifuah (2010), ada 3 indikator *Financial Literacy*, antara lain :

- a) *Financial Knowledge* : memiliki pengetahuan mengenai terminologi-terminologi keuangan, misalnya tingkat suku bunga bank, kartu kredit, kebangkrutan, pasar saham, bermacam-macam layanan jasa perbankan, memahami istilah-istilah, perhitungan-perhitungan dan manfaat perpajakan, tau berbagai layanan mengelola pensiun, mengetahui berbagai sumber pendapatan keluarga, dll.
- b) *Financial Attitudes* : ketertarikan atau minat dalam memperbaiki pengetahuan keuangan, merencanakan program keuangan pensiun untuk karyawannya, melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal pajak, menggunakan layanan-layanan jasa perbankan yang berkaitan dengan luar negeri. Misal giro, kliring, L/C, dll.
- c) *Financial Behavior* : berorientasi untuk *spending* dan *saving*, mencatat dan menyimpan catatan keuangan pribadinya, dan merencanakan pembiayaan untuk masa depan, mengelola hutang dan kredit dengan tepat sesuai dengan *cash flow* perusahaan.

Dalam penelitian Tasya Desiyana (2015) istilah literasi keuangan (*financial literacy*) banyak ditemukan dan mempunyai definisi menurut beberapa ahli, sebagai berikut : Literasi keuangan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan (Remund, 2010). Menurut President's Advisory Council (dalam penelitian Monticone, 2011) literasi keuangan adalah kemampuan dalam

menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk kesejahteraan hidup.

Literasi keungan adalah pengetahuan yang mengajarkan bagaimana cara mengelola dan menganalisis kondisi keuangan. Literasi keuangan dapat di definisikan dalam arti luas maupun sempit, definisi secara luas yaitu mengadopsi pemahaman ekonomi dan bagaimana keadaan ekonomi dan mempengaruhi keputusan rumah tangga (Worntington dalam Capuano dan Ramsey, 2011). Sedangkan definisi secara sempit menurut Gallery, Newton dan Palm, 2010 (dalam penelitian Capuano dan Ramsey, 2011) literasi keuangan berfokus pada alat manajemen keuangan dasar seperti penganggaran, menabung, investasi, dan asuransi.

Memahami implikasi finansial yang di timbulkan dari keputusan keuangan merupakan hal yang mendasar dalam literasi finansial. Keputusan yang berdasarakan informasi di akui sebagai instrumen untuk mencapai outcome yang di harapkan. Hal penting yang harus di catat disini bahwa literasi finansial hanya menjadikan seseorang mampu membuat keputusan yang berdasarakan informasi yang relevan. Financial literacy tidak menjamin bahwa keputusan yang tepat yang di buat. Hal tersebut disebabkan karena seseorang tidak selalu mengambil keputusan berdasarakan rasional ekonomi (Wilson & Zhang di dalam Carolynne L J Mason & Richard M S Wilson : 2000).

2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan

Tingkat literasi keuangan yang di miliki setiap individu tentunya berbeda-beda. Hal tersebut di sebabkan oleh perbedaan faktor yang mempengaruhinya

sehingga terjadi perbedaan yang signifikan antara individu satu dengan individu lainnya.

a) Perilaku Keuangan (Financial Behavior)

Barberis dan Thaler (2003) dalam Bodie, Kane, dan Marcus (2008) menjelaskan behavioral finance sebagai sebuah model pasar keuangan yang menekankan implikasi potensial dari faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku investor. Premisnya adalah bahwa teori keuangan konvensional kurang memperhatikan bagaimana orang sebenarnya membuat keputusan dan bahwa orang-orang membuat perbedaan. Semakin banyak ekonom menginterpretasikan literatur bahwa anomali pasar konsisten dengan irasionalitas, yang sepertinya menjadi ciri-ciri bagi para individu yang mengambil keputusan yang rumit. Ricciardi dan Simon (2000: 2) “Behavioral finance attempts to explain and increase understanding of the reasoning patterns of investors, including the emotional processes involved and the degree to which they influence the decision-making process”.

Litner (1998: 7) “ Behavioral finance is the study of how humans interpret and act on information to make informed investment decisions”. Mengacu pada definisi tersebut, behavioral finance merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menyingkapi dan bereaksi atas informasi yang ada dalam upaya untuk mengambil keputusan yang dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian dengan memperhatikan resiko yang melekat di dalamnya (unsur sikap dan tindakan manusia merupakan faktor penentu dalam berinvestasi).

Financial Behavior berhubungan dengan tanggung jawab keuangan seseorang terkait dengan cara pengelolaan keuangan. Tanggung jawab keuangan merupakan proses pengelolaan uang dan aset yang dilakukan secara produktif. Pengelolaan uang adalah proses menguasai dan menggunakan aset keuangan. Ada beberapa elemen yang masuk ke pengelolaan uang yang efektif, seperti pengaturan anggaran, menilai pembelian berdasarkan kebutuhan. Aktivitas utama dalam pengelolaan uang adalah proses penganggaran. Anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa individu mampu mengelola kewajiban keuangan secara tepat waktu dengan menggunakan penghasilan yang diterima dalam periode yang sama (Ida dan Dwinta, 2010 dalam penelitian Vincentius Andrew dan Nanik Linawati).

Menurut Hilgert, Holgart dan Baverly, 2003 (dalam penelitian Peter Garlans Sina) menyebutkan bahwa perilaku keuangan seseorang akan tampak dari seberapa bagus seseorang mengelola uang kas, mengelola utang, tabungan dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Mengelola uang kas seperti bagaimana ketepatan mengelola uang sesuai atau tidak dengan anggaran yang dibuat, dan masih banyak lain-lainnya.

Menurut Statman, 2008 (dalam Prof. Dr. Marwan Asri, M.B.A, 2013, hal 225) Keuangan Keperilakuan adalah sebuah pendekatan alternatif dari teori keuangan konvensional (yang disebutnya sebagai teori keuangan standar atau *standar finance*) yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya adalah :

- Dalam teori keuangan standar manusia dianggap rasional, sedangkan dalam Keuangan Keperilakuan manusia dianggap “*normal*”. Artinya,

manusia tidak sepenuhnya rasional. Manusia mempunyai emosi, dan ia tidak dapat merencanakan dan sepenuhnya kapan ia menggunakan rasio, kapan menggunakan emosi, dan pemakaian rasio dan emosi terjadi secara alamiah dan ditemukan oleh berbagai variabel.

- Dalam teori keuangan standar diasumsikan bahwa pasar efisien. Dalam keuangan berperilaku pasar diasumsikan tidak efisien, meskipun diakui tidak mudah untuk ditaklukkan dan didahului. Harga dimungkinkan untuk menyimpang dari nilai fundamentalnya disebabkan oleh berbagai hal, termasuk variabel-variabel psikologis.
- Dalam teori keuangan standar investor diasumsikan akan membentuk portofolio berdasarkan kriteria mean-variance yang diajarkan oleh Markowitz. Tetapi dalam teori Keuangan Berperilaku investor membentuk portofolio berdasarkan aturan yang disebut Statman sebagai teori portofolio berperilaku (*behavioral portfolio theory*).
- Dalam teori keuangan standar hasil yang diharapkan diukur dengan menggunakan model harga aset (*Capital Asset Pricing Model*) dimana risiko diukur dengan beta dan risiko merupakan satu-satunya faktor penentu. Dalam teori keuangan berperilaku hasil yang diharapkan diukur dengan menggunakan *Behavioral Asset Pricing Model*, dimana hasil yang diharapkan merupakan fungsi dari berbagai variabel berperilaku investor.

b) Faktor Demografi

Demografi merupakan gambaran mengenai latar belakang seseorang sehingga dapat mempengaruhi financial literacy mereka (Mandel, 2008).

Rita dan Kusumawati (2010) menyatakan faktor sosio-demografi terdiri dari gender, usia, tingkat pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, jabatan, dan pendapatan. Usia adalah batasan atau tingkat ukuran hidup yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang.

Dalam hal ini dikatakan bahwa perempuan dan etnis minoritas memiliki pengetahuan keuangan yang rendah, sementara menurut Bernheim dalam Monticone (2010) menyatakan bahwa laki-laki memiliki pengetahuan keuangan dan ekonomi makro yang baik. Hal tersebut disebabkan oleh tinggi rendahnya pendidikan yang ditempuh, akan tetapi selain pendidikan formal, kemampuan kognitif memiliki peran untuk meningkatkan pengetahuan keuangan. Jadi pada intinya, faktor-faktor yang terdapat dalam demografi yaitu meliputi gender, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan (Tasya Desiyana, 2015).

- Pendidikan

Variabel pendidikan sebagai *human capital* merupakan salah satu variabel yang diharapkan akan memberikan efek terhadap kesejahteraan seseorang. Variabel pendidikan berpengaruh pada produktifitas dan efisiensi kerja seseorang yang kemudian akan mempengaruhi *real income* individu atau rumah tangga (Rahmatia, 2004).

- Gender

Chen dan Volpe (1998) menemukan bahwa dalam hal *financial literacy* pada tingkat umum perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Lalonde dan Schmidt (2010) hal ini memperkuat temuan yang menyatakan bahwa

literasi keuangan bentuk pengetahuan umum pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

- Pendapatan

Charles dan Walter (2007) mendefinisikan pendapatan (Revenue) yaitu jumlah yang diperoleh setelah memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Keown (2011) menjelaskan terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan pengetahuan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua dengan pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi karena mereka lebih sering menggunakan instrumen dan layanan finansial.

Personal income adalah total pendapatan kotor tahunan seorang individu yang berasal dari upah, perusahaan bisnis dan berbagai investasi. *Personal income* adalah penghasilan pribadi sebelum pajak. *Personal income* diukur berdasarkan pendapatan dari semua sumber. Komponen terbesar dari total pendapatan adalah upah dan gaji. *Personal income* adalah indikator yang baik untuk permintaan konsumen masa depan, meskipun tidak sempurna (Hilgert, et al., 2003).

2.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a) Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat yang tangguh dan mampu menunjukkan eksistensinya di dunia usaha. Pertumbuhan jumlah unit UMKM disetiap tahunnya selalu meningkat, hal ini berdampak positif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran.

Definisi mengenai UMKM masih sangat bervariasi, dibawah ini definisi yang berkaitan dengan UMKM antara lain menurut :

1) Menurut UU No.20 Tahun 2008 yang dimaksud Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2) Menurut Bank Indonesia, usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum

seperti koperasi bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.200.000.000 per tahun. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tepatnya dengan besaran yang dibedakan antara industri, manufaktur (Rp.200.000.000 s/d Rp.5.000.000.000) dan non manufaktur (Rp.200.000.000 s/d Rp.600.000.000).

- 3) Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s/d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s/d 99 orang.
- 4) Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp.600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan, pengrajin/industri rumah.
- 5) Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Menekop dan UMKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai/memiliki kekayaan bersih paling banyak

Rp.200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000 s/d Rp.10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

b) **Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, kriteria UMKM digolongkan berdasarkan asset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Selain berdasarkan Undang-undang, menurut Rahmana (2008) dalam perspektif perkembangannya kriteria Usaha Kecil dan Menengah dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

- Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- Fast Moving Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

c) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam upaya pemberdayaan UMKM, Bank Indonesia (www.bi.go.id) memiliki filosofi *Five Finger Philosophy* yaitu

pemberdayaan UMKM yang diibaratkan seperti lima jari di tangan dimana setiap jari memiliki peran masing-masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih kuat jika dilakukan secara bersamaan.

- a. Jari jempol. Mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai agents of development (agen pembangunan).
 - b. Jari telunjuk. Mewakili regulator yakni pemerintah dan Bank Indonesia berperan dalam regulator sektor rill dan fiskal, menerbitkan izin-izin usaha, mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.
 - c. Jari tengah. Mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk Promoting Enterprise Access to Credit (PEAC) Units, perusahaan penjamin kredit.
 - d. Jari manis. Mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, khususnya usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM.
 - e. Jari kelingking. Mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja.
- d) Sumber Modal dan Pangsa Pasar UMKM

Pada umumnya sumber modal UMKM berasal dari modal sendiri, tetapi untuk mengembangkan usahanya memerlukan modal dari luar

(tambahan). Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan modal UMKM dapat dilakukan dengan mencari dana melalui fasilitasi perkreditan dari perbankan atau non perbankan dan fasilitasi dana bergulir baik dari pemerintah ataupun swasta. Untuk memperoleh dana melalui kredit memerlukan persyaratan seperti proposal kegiatan usaha. Lembaga keuangan dan non keuangan juga memerlukan persyaratan lain untuk memberikan kredit. Persyaratan ini sering menjadi kendala bagi pelaku UMKM untuk mendapat dana pinjaman dalam pengembangan usahanya.

Indonesia masih butuh lebih banyak lagi wirausahawan baru, khususnya wirausaha muda yang inovatif, cerdas, berani menghadapi tantangan yang demikian ketat. Jumlah wirausahawan kita saat ini baru sekitar 1,65% dari jumlah penduduk Indonesia yang telah mencapai 240 juta jiwa lebih. Tingkat kewirausahaan di Indonesia masih kalah dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand sudah di atas 4% dari populasi. Meski begitu, jumlah pelaku usaha kita dari tahun ke tahun terus naik karena dukungan pemerintah untuk usaha kecil menengah semakin kuat.

Pemerintah menyadari, negara akan maju lebih pesat jika jumlah wirausaha mencapai minimal 2% dari populasi. Pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di negeri ini menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2014 mencapai 57,9 juta unit atau setara 99,99% dari seluruh unit bisnis. Namun penyaluran kredit ke sektor UMKM sampai akhir 2014 hanya setara 18% dari total kredit outstanding, tepatnya Rp

686,84 triliun. sebanyak 52,49% dari kredit UMKM itu mengalir ke sektor ritel besar dan kecil.

Potensi UMKM yang demikian besar terus diperebutkan oleh semua lembaga keuangan, baik bank-bank besar seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, bank swasta nasional, Bank Bukopin, Bank BCA, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga bank swasta yang modalnya dimiliki asing seperti Bank Danamond, Bank BTPN, My Bank (BII) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), maupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu pilar pelaku ekonomi kerakyatan adalah UMKM. Namun, dukungan pembiayaan (modal kerja dan investasi serta cakupan pendanaan yang diperlukan lainnya) terhadap pengembangan UMKM masih sangat kurang memadai. Oleh karena itu diperlukan adanya dukungan dari beberapa pihak diantaranya pelaku usaha, lembaga pendukung, dan pemerintah.

2.4. Penelitian Terdahulu

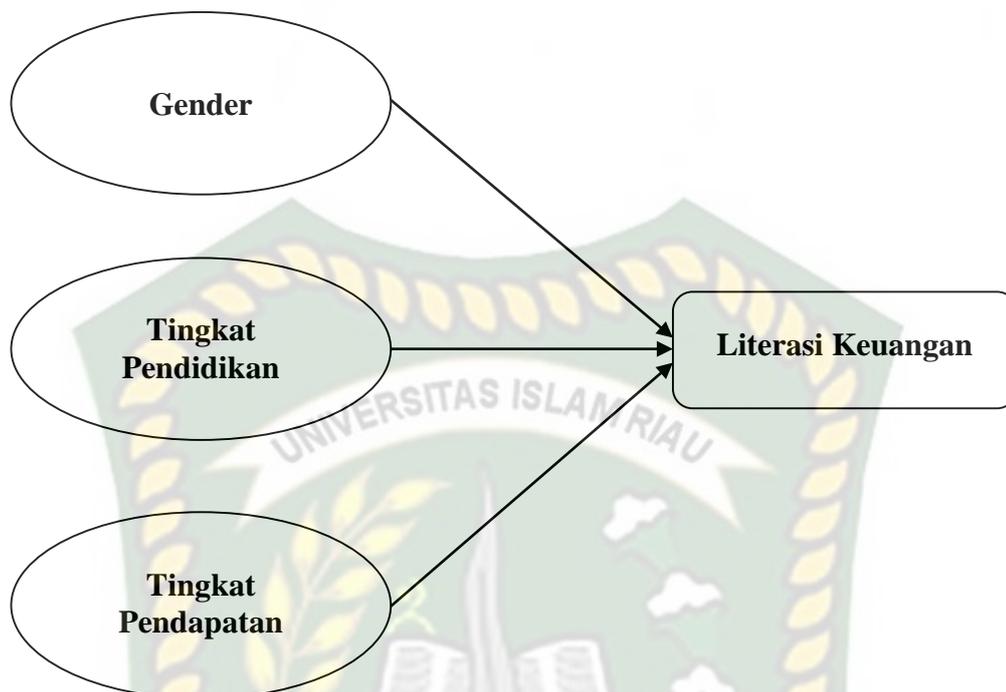
Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat/Metode Analisis	Kesimpulan
1	Nur Aziza Ariani dan Susanti	Pengaruh Faktor Demografi terhadap Financial Literacy	Variabel Bebas (X1) Faktor demografi (X2) Financial	1) Uji Goodness of Fit Hosmer and Lemeshow Test 2) Uji-2log Likelihood	Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial literacy

		Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya	Literasi	3) Uji Parsial 4) Uji Koefisien Determinasi 5) Uji Simultan	mahasiswa dipengaruhi oleh faktor demografi berupa IPK dan penggunaan ATM, sedangkan faktor demografi berupa jenis kelamin, tempat tinggal dan pengalaman bekerja tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap financial literacy mahasiswa. Aspek financial literacy yang masih rendah adalah pengetahuan umum keuangan
--	--	---	----------	--	---

					pribadi.
2	Tasya Desiyana (2015)	Analisis Tingkat Literasi Keuangan pada pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah di daerah Istimewa Yogyakarta	Variabel Bebas (X1) Tingkat Literasi Keuangan	Uji Validitas, uji Realibilitas dan Analisis Chi-Square	Tidak terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini berdasarkan kategori usaha pada sisi kemampuan.
3	Riski Amaliyah dan Rini Setyo Witiastuti (2015)	Analisis Faktor yang mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan UMKM Kota Tegal	Variabel Bebas X1 Gender X2 Tingkat Pendidikan X3 Tingkat Pendapatan	Analisis Regresi Logistik Biner	Terdapat kontribusi dari variabel gender, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan dalam mempredksi tingkat literasi keuangan secara bersamaan sebesar 59%.

2.5. Kerangka Pemikiran



2.6. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan dan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan, maka hipotesis yang akan diujikan kebenarannya secara empiris adalah :

a) H_0 : Diduga tingkat literasi keuangan para pelaku usaha mikro di Kota Pekanbaru masih rendah.

H_a : Diduga tingkat literasi keuangan para pelaku usaha mikro di Kota Pekanbaru tinggi.

b) Gender, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan para pelaku usaha mikro di Kota Pekanbaru.